

POLITICS OF TANGENTS

Keberadaan Indonesia di Persimpangan Kekuasaan, Ekonomi, Demokrasi, Institusi, dan Geopolitik

Pengantar

Indonesia sedang memasuki suatu fase perkembangan politik yang tidak mudah dijelaskan dengan kategori-kategori konvensional. Politik nasional tidak lagi cukup dibaca sebagai persaingan sederhana antara pemerintah dan oposisi, antara negara dan masyarakat, atau antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa. Kekuasaan kini bekerja melalui jaringan yang luas, berlapis, dan saling berhubungan. Di dalamnya terdapat presiden, kabinet, partai politik, parlemen, birokrasi, pemerintah daerah, dunia usaha, media, masyarakat sipil, kelompok profesional, organisasi keagamaan, pasar keuangan, investor, lembaga internasional, dan kekuatan geopolitik.

Naskah *Politics of Tangents* karya Johnny Wenas Polii mengembangkan istilah **Politics of Tangents** atau **Politik Tangens** sebagai kerangka untuk memahami persinggungan berbagai kekuatan tersebut. Politik dipandang sebagai proses ketika kepentingan-kepentingan yang berbeda bertemu pada titik tertentu dan menghasilkan kerja sama, kompromi, persaingan, pertukaran, dominasi, atau konflik.

Kerangka ini relevan karena keputusan publik hampir tidak pernah lahir dari satu kepentingan tunggal. Kebijakan subsidi, misalnya, bukan sekadar kebijakan ekonomi. Subsidi menyentuh kepentingan fiskal pemerintah, kepentingan politik penguasa, kebutuhan masyarakat, tuntutan industri, stabilitas harga, daya beli, serta persepsi publik terhadap keadilan. Demikian pula, kebijakan suku bunga bukan hanya persoalan teknokratis Bank Indonesia. Kebijakan tersebut memengaruhi investasi, kredit, konsumsi, sektor properti, nilai tukar, pasar modal, biaya utang pemerintah, dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, politik Indonesia dapat dipahami sebagai kumpulan titik singgung. Pada satu isu, pemerintah, partai politik, pengusaha, dan masyarakat dapat bekerja sama. Pada isu lain, aktor-aktor yang sama dapat berhadapan. Sebuah koalisi dapat kuat dalam pemungutan suara di parlemen, tetapi tidak selalu solid dalam pembagian anggaran, penentuan regulasi, kebijakan ekonomi, atau kompetisi elektoral di daerah.

Artikel ini memperluas gagasan *Politics of Tangents* menjadi suatu kerangka analisis yang lebih komprehensif. Pembahasan mencakup teori elite, pluralisme, teori koalisi, institusionalisme, pilihan publik, ekonomi politik, teori jaringan, hubungan principal-agent, teori permainan, legitimasi, kebijakan fiskal dan moneter, keadilan sosial, tata kelola pemerintahan, serta posisi geopolitik Indonesia.

Angka-angka ekonomi dan politik kontemporer yang disebutkan dalam pembahasan mengikuti data yang dicantumkan dalam naskah sumber dan diperlakukan sebagai basis analisis dokumen, bukan sebagai hasil verifikasi statistik independen.

Abstrak

Perkembangan politik Indonesia pada 2025–2026 memperlihatkan pola hubungan kekuasaan yang semakin kompleks, tidak linear, dan berbasis jaringan. Pemerintah, partai politik, parlemen, birokrasi, kelompok bisnis, masyarakat sipil, media, pasar keuangan, pemerintah daerah, serta kekuatan geopolitik saling berinteraksi dalam proses pembuatan kebijakan. Artikel ini mengembangkan konsep *Politics of Tangents* sebagai kerangka untuk menjelaskan titik-titik persinggungan antara kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, institusi, legitimasi sosial, demokrasi, dan geopolitik. Persinggungan tersebut dapat menghasilkan kolaborasi, kompromi, kompetisi, dominasi, maupun konflik.

Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori elite, pluralisme, teori koalisi, institusionalisme, pilihan publik, ekonomi politik, principal–agent theory, teori permainan, teori jaringan, dan teori legitimasi. Artikel ini berpendapat bahwa stabilitas Indonesia tidak cukup dinilai dari besarnya dukungan politik terhadap pemerintah atau dari indikator pertumbuhan ekonomi. Stabilitas berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan, akuntabilitas demokratis, kredibilitas institusi, pemerataan kesejahteraan, kepastian hukum, kepercayaan publik, dan kemandirian strategis dalam hubungan internasional.

Tiga skenario dikembangkan, yaitu *Tangent Equilibrium*, *Elite Consolidation*, dan *Confidence Shock*. Skenario terbaik terjadi ketika persinggungan kepentingan dapat dikelola menjadi kolaborasi nasional. Sebaliknya, konsentrasi kekuasaan yang tidak disertai pengawasan, pertumbuhan yang tidak menghasilkan kesejahteraan nyata, serta tekanan ekonomi yang bertepatan dengan melemahnya legitimasi dapat mengubah titik singgung menjadi sumber konflik. Artikel ini merekomendasikan pengembangan *Tangent Governance*, yaitu tata kelola yang mempertemukan negara, pasar, masyarakat, akademisi, pekerja, parlemen, dan pemerintah daerah dalam proses kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Kata kunci: Politics of Tangents, politik Indonesia, kekuasaan, ekonomi politik, legitimasi, demokrasi, institusi, teori jaringan, geopolitik, tata kelola.

1. Indonesia dalam Lanskap Politik yang Tidak Linear

Model politik linear biasanya menggambarkan pemerintah sebagai pusat kekuasaan yang merumuskan kebijakan, birokrasi sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai penerima. Model tersebut semakin tidak memadai. Dalam kenyataannya, keputusan pemerintah dipengaruhi oleh koalisi partai, konfigurasi parlemen, kemampuan fiskal, opini publik, kondisi pasar, kepentingan bisnis, tekanan pemerintah daerah, pemberitaan media, gerakan masyarakat sipil, serta perkembangan internasional.

Kekuasaan tidak hanya bergerak dari atas ke bawah. Kekuasaan juga bergerak secara horizontal, diagonal, bahkan dari bawah ke atas. Media sosial dapat mengubah agenda pemerintah. Pasar keuangan dapat merespons kebijakan dalam hitungan menit. Pemerintah daerah dapat menunda, mengubah, atau mempercepat implementasi program nasional. Kelompok masyarakat dapat menggugat kebijakan melalui pengadilan. Pengusaha dapat memengaruhi kebijakan melalui investasi, asosiasi bisnis, konsultasi regulasi, atau jaringan informal. Lembaga internasional dapat memengaruhi pilihan kebijakan melalui pembiayaan, standar perdagangan, kesepakatan lingkungan, dan diplomasi.

Naskah sumber menggambarkan struktur ini sebagai suatu bentuk *political network state*, yaitu negara yang efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kemampuan aktor mengelola hubungan dengan aktor lainnya.

Konsekuensinya, posisi formal tidak selalu sama dengan kekuasaan efektif. Seorang pejabat dapat memiliki kewenangan luas secara hukum, tetapi lemah dalam implementasi karena tidak memiliki dukungan politik, kapasitas birokrasi, kepercayaan publik, atau jaringan sosial. Sebaliknya, aktor yang tidak memiliki jabatan formal dapat berpengaruh besar karena menguasai modal, informasi, teknologi, opini publik, atau akses terhadap kelompok pengambil keputusan.

Politik Indonesia juga memperlihatkan bahwa identitas pemerintah dan oposisi semakin cair. Partai yang mendukung pemerintah pada tingkat nasional dapat bersaing keras dalam pemilihan kepala daerah. Aktor yang berkoalisi dalam satu kebijakan dapat berbeda pendapat dalam kebijakan lainnya. Organisasi masyarakat yang mendukung program sosial pemerintah dapat mengkritik kebijakan lingkungan atau penegakan hukum. Dunia usaha yang mendukung pembangunan infrastruktur dapat menolak perubahan pajak tertentu.

Karena itu, konsep politik sebagai garis lurus perlu diganti dengan politik sebagai jaringan persinggungan.

2. Pengertian Politics of Tangents

Secara geometris, garis tangens atau garis singgung menyentuh sebuah lingkaran pada satu titik tertentu. Dalam konteks sosial-politik, istilah tangens digunakan secara metaforis untuk menggambarkan keadaan ketika dua atau lebih kepentingan yang berbeda bertemu pada satu isu, kebijakan, kebutuhan, atau momentum.

Persinggungan tidak berarti bahwa para aktor menjadi sepenuhnya sama. Mereka hanya memiliki kepentingan bersama pada titik tertentu. Setelah tujuan tersebut tercapai atau situasi berubah, mereka dapat kembali berbeda.

Sebagai contoh, pemerintah dan dunia usaha dapat memiliki titik singgung dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah membutuhkan investasi, lapangan kerja, peningkatan konektivitas, serta penerimaan pajak. Dunia usaha membutuhkan proyek, kepastian regulasi, keuntungan, dan akses pasar. Masyarakat membutuhkan pekerjaan dan pelayanan publik. Namun, persinggungan itu dapat berubah menjadi konflik apabila pembebasan tanah tidak adil, lingkungan rusak, biaya proyek membengkak, atau manfaat ekonomi tidak dirasakan masyarakat lokal.

Dengan demikian, tangensi politik memiliki sifat:

1. **Temporer**, karena persinggungan dapat berubah sesuai situasi.

2. **Spesifik terhadap isu**, karena kesamaan kepentingan pada satu kebijakan tidak menjamin kesamaan pada kebijakan lain.
3. **Berbasis pertukaran**, karena aktor membawa sumber daya, tuntutan, dan ekspektasi masing-masing.
4. **Asimetris**, karena kekuatan para aktor tidak selalu seimbang.
5. **Dinamis**, karena perubahan ekonomi, teknologi, opini publik, dan geopolitik dapat mengubah konfigurasi.
6. **Berpotensi produktif maupun destruktif**, bergantung pada tata kelola.

Secara konseptual, naskah sumber merumuskan:

$$\begin{bmatrix} PT = f(P, I, E, S, M, B, G, L) \end{bmatrix}$$

Dalam rumusan tersebut, *PT* adalah *Politics of Tangents*. Variabel *P* merepresentasikan kekuasaan politik, *I* kelompok kepentingan, *E* kekuatan ekonomi, *S* kekuatan sosial, *M* media dan opini publik, *B* birokrasi, *G* geopolitik, dan *L* legitimasi.

Model tersebut dapat diperluas dengan memasukkan beberapa variabel tambahan:

$$\begin{bmatrix} PT = f(P, E, I, B, S, M, T, R, G, L) \end{bmatrix}$$

dengan:

- (P) = kekuasaan politik;
- (E) = kekuatan ekonomi;
- (I) = kualitas institusi;
- (B) = kapasitas birokrasi;
- (S) = struktur sosial;
- (M) = media dan opini publik;
- (T) = teknologi dan arsitektur informasi;
- (R) = aturan dan kredibilitas regulasi;
- (G) = faktor geopolitik;
- (L) = legitimasi.

Teknologi perlu ditambahkan karena platform digital, kecerdasan buatan, algoritma media sosial, sistem pembayaran, data besar, dan keamanan siber telah menjadi bagian penting dari politik kontemporer. Regulasi juga perlu dipisahkan dari institusi karena kualitas aturan dan konsistensi pelaksanaannya menentukan perilaku aktor ekonomi maupun politik.

3. Politics of Tangents dan Teori Elite

Teori elite berpijak pada gagasan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh tidak proporsional terhadap keputusan publik. Mereka dapat berasal dari elite politik, birokrasi, militer, bisnis, akademik, media, organisasi sosial, atau keluarga berpengaruh.

Dalam konteks Indonesia, teori elite membantu menjelaskan mengapa akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi tidak tersebar secara merata. Sebagian aktor memiliki akses langsung kepada pejabat tinggi, pengurus partai, pemilik media, lembaga keuangan, atau aparat pemerintah. Mereka lebih mudah menyampaikan kepentingan, memengaruhi agenda, atau memperoleh informasi lebih awal.

Namun, teori elite tidak cukup apabila digunakan secara tunggal. Politik Indonesia juga dipengaruhi pemilih, media sosial, kelompok masyarakat sipil, organisasi profesi, mahasiswa, serikat pekerja, komunitas keagamaan, pemerintah daerah, dan gerakan berbasis isu. Naskah sumber menegaskan bahwa struktur Indonesia lebih tepat dipahami sebagai interaksi antara kekuatan elite, tekanan elektoral, kontrol institusional, dan opini masyarakat.

Dalam kerangka Politik Tangens, elite tidak selalu bertindak sebagai kelompok tunggal. Elite politik dapat berbeda kepentingan dengan elite bisnis. Elite pusat dapat berhadapan dengan elite daerah. Elite partai dapat bersaing dengan elite birokrasi. Pemilik modal domestik dapat memiliki kepentingan berbeda dari investor asing. Bahkan dalam satu partai, terdapat faksi, jaringan patronase, perbedaan generasi, dan kompetisi kepemimpinan.

Karena itu, oligarki atau dominasi elite tidak selalu berbentuk satu piramida kekuasaan yang seragam. Ia dapat berbentuk jaringan beberapa pusat kekuatan yang saling bernegosiasi.

Persoalan demokrasi muncul ketika persinggungan antarelite menghasilkan kesepakatan yang tertutup dan mengabaikan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kompromi elite mungkin menghasilkan stabilitas jangka pendek, tetapi melemahkan legitimasi jangka panjang. Masyarakat dapat merasakan bahwa kebijakan lebih menguntungkan kelompok yang dekat dengan kekuasaan dibandingkan kelompok yang tidak mempunyai akses.

Sebaliknya, elite juga dapat memainkan fungsi positif. Elite politik dapat menjembatani konflik, membangun konsensus, dan menciptakan reformasi. Elite bisnis dapat membawa investasi dan teknologi. Elite akademik dapat menyediakan pengetahuan. Elite birokrasi dapat menjaga kontinuitas administrasi. Yang menentukan bukan sekadar keberadaan elite, melainkan mekanisme akuntabilitas, transparansi, sirkulasi elite, serta keterbukaan akses terhadap proses pengambilan keputusan.

4. Pluralisme dan Kompetisi Kepentingan

Pluralisme melihat politik sebagai kompetisi di antara banyak kelompok. Tidak ada satu kelompok yang sepenuhnya mengendalikan semua bidang kehidupan. Sebuah kelompok dapat kuat dalam ekonomi, tetapi lemah secara elektoral. Kelompok lain dapat memiliki jumlah anggota besar, tetapi kapasitas organisasinya terbatas.

Indonesia merupakan negara yang sangat plural. Keragamannya mencakup suku, agama, bahasa, wilayah, tingkat pendapatan, profesi, generasi, dan orientasi politik. Keragaman tersebut dapat menjadi sumber kekuatan maupun konflik.

Politik Tangens memperlihatkan bahwa pluralisme tidak harus berakhir dalam fragmentasi. Kelompok-kelompok yang berbeda dapat menemukan kepentingan bersama. Organisasi buruh dan pengusaha, misalnya, sama-sama berkepentingan terhadap kelangsungan perusahaan, walaupun berbeda dalam persoalan upah dan kondisi kerja. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama menginginkan pembangunan, tetapi dapat berbeda dalam pembagian kewenangan dan pendapatan.

Dalam masyarakat plural, tata kelola yang baik bukanlah menghapus perbedaan, melainkan menyediakan prosedur yang adil untuk mengelola perbedaan. Prosedur tersebut mencakup:

- konsultasi publik;
- proses legislasi yang terbuka;
- mekanisme pengaduan;
- peradilan independen;
- desentralisasi yang proporsional;
- kebebasan pers;
- perlindungan kelompok minoritas;
- akses informasi;
- partisipasi masyarakat;
- evaluasi dampak kebijakan.

Apabila prosedur tersebut lemah, kelompok yang memiliki sumber daya terbesar akan mendominasi titik persinggungan. Politik kemudian berubah dari pluralisme menjadi *state capture* atau *regulatory capture*, yaitu keadaan ketika kebijakan publik lebih banyak melayani kepentingan kelompok tertentu.

5. Teori Koalisi dan Pemerintahan Besar

Koalisi merupakan bagian penting dari sistem politik Indonesia. Dalam sistem multipartai, seorang presiden membutuhkan dukungan parlemen untuk mengesahkan anggaran, membentuk undang-undang, dan mempertahankan stabilitas pemerintahan.

Teori koalisi menjelaskan bahwa partai tidak selalu bergabung karena kesamaan ideologi. Pertimbangan yang lebih pragmatis dapat mencakup akses terhadap kekuasaan, jabatan, sumber daya, kebijakan, perlindungan politik, dan keuntungan elektoral. Naskah sumber menyatakan bahwa kekuatan koalisi tidak boleh hanya diukur dari jumlah kursi, tetapi dari kemampuannya menghasilkan pemerintahan efektif sekaligus mempertahankan akuntabilitas demokratis.

Koalisi besar mempunyai beberapa keuntungan. Pemerintah lebih mudah mengesahkan undang-undang, menghindari kebuntuan politik, dan melaksanakan program. Konflik antara eksekutif dan legislatif dapat dikurangi. Stabilitas politik juga dapat meningkat.

Namun, koalisi yang terlalu besar memiliki risiko:

- fungsi oposisi melemah;
- pengawasan parlemen menurun;
- kritik internal menjadi tidak efektif;
- pembagian jabatan lebih dominan daripada kompetensi;
- tanggung jawab politik menjadi kabur;
- masyarakat kesulitan membedakan alternatif kebijakan;
- pengambilan keputusan berpindah dari forum publik ke negosiasi tertutup.

Di sinilah terdapat paradoks koalisi. Koalisi yang terlalu kecil dapat menyebabkan instabilitas, tetapi koalisi yang terlalu besar dapat mengurangi kualitas demokrasi.

Jalan keluarnya bukan sekadar memperkecil atau memperbesar koalisi, melainkan mengubah **koalisi kekuasaan menjadi koalisi kinerja**. Partai-partai pendukung pemerintah perlu menyepakati indikator hasil yang dapat diperiksa masyarakat: penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas, mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, pengendalian harga, dan perbaikan institusi.

Koalisi yang hanya didasarkan pada pembagian posisi akan mudah rapuh ketika sumber daya berkurang. Koalisi berbasis kinerja mempunyai landasan yang lebih kuat karena keberhasilannya terhubung langsung dengan kepentingan publik.

6. Institusi: Membatasi dan Memungkinkan Kekuasaan

Institusi adalah aturan formal dan informal yang mengatur perilaku politik. Konstitusi, undang-undang, pengadilan, parlemen, lembaga audit, bank sentral, birokrasi, pemerintah daerah, dan sistem pemilu merupakan bagian dari institusi formal. Norma sosial, etika jabatan, budaya organisasi, patronase, serta kebiasaan politik merupakan institusi informal.

Institusi mempunyai dua fungsi utama. Pertama, institusi membatasi kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Kedua, institusi memungkinkan pemerintah bertindak secara efektif.

Negara dengan institusi lemah dapat mengalami dua masalah yang berlawanan. Di satu sisi, pejabat dapat menyalahgunakan kewenangan karena pengawasan tidak berjalan. Di sisi lain, pemerintah dapat gagal menjalankan program karena koordinasi, kapasitas, dan kepastian prosedural rendah.

Naskah sumber mengingatkan bahwa pemerintah yang kuat tanpa *checks and balances* berpotensi menghasilkan konsentrasi kekuasaan, sedangkan pengawasan yang terlalu fragmentatif dapat menghasilkan kelambanan pemerintahan.

Oleh sebab itu, tujuan reformasi institusi bukanlah membuat negara selemah mungkin atau sekuat mungkin. Tujuannya adalah membentuk negara yang:

- kuat dalam memberikan pelayanan;
- efektif dalam menjalankan kebijakan;

- cepat merespons krisis;
- terbatas oleh hukum;
- terbuka terhadap pengawasan;
- dapat dimintai pertanggungjawaban;
- menghormati hak warga negara.

Institusi yang kredibel juga mengurangi biaya transaksi. Investor tidak perlu membayar biaya informal untuk memperoleh kepastian. Warga tidak perlu menggunakan koneksi untuk mendapatkan pelayanan. Pejabat tidak perlu menunggu arahan politik untuk menjalankan kewenangan yang sudah jelas.

Dalam Politik Tangens, institusi berfungsi sebagai arena dan aturan permainan. Tanpa institusi, titik singgung mudah berubah menjadi transaksi personal. Dengan institusi yang baik, persinggungan kepentingan dapat diubah menjadi negosiasi yang transparan dan dapat diperiksa.

7. Public Choice dan Kepentingan Para Pengambil Kebijakan

Teori *public choice* menolak asumsi bahwa aktor pemerintah selalu bertindak semata-mata untuk kepentingan umum. Politisi dapat mengejar suara, jabatan, popularitas, dan keberlanjutan kekuasaan. Birokrat dapat mengejar anggaran, kewenangan, jumlah pegawai, dan keamanan posisi. Kelompok kepentingan dapat berusaha memperoleh subsidi, proteksi, lisensi, atau regulasi yang menguntungkan.

Pendekatan ini penting agar masyarakat tidak memandang negara secara terlalu romantis. Kebijakan yang tampak ideal dapat dipengaruhi insentif politik. Proyek besar dapat dipilih bukan karena manfaat sosial tertinggi, tetapi karena mudah terlihat dan menghasilkan keuntungan elektoral. Subsidi dapat dipertahankan meskipun tidak tepat sasaran karena penghapusannya tidak populer.

Empat risiko utama yang perlu diperhatikan adalah:

7.1 Rent Seeking

Rent seeking terjadi ketika aktor memperoleh keuntungan bukan melalui peningkatan produktivitas, tetapi melalui kedekatan dengan kekuasaan, lisensi khusus, proteksi, monopoli, atau penguasaan regulasi.

7.2 Regulatory Capture

Lembaga yang seharusnya mengawasi industri justru terlalu dekat dengan industri yang diawasinya. Akibatnya, regulasi dirancang lebih untuk melindungi pelaku usaha daripada masyarakat.

7.3 Moral Hazard

Aktor mengambil risiko berlebihan karena memperkirakan bahwa kerugian akan ditanggung pihak lain. Misalnya, lembaga atau perusahaan yang yakin akan diselamatkan pemerintah dapat mengabaikan disiplin pengelolaan.

7.4 Politik Anggaran

Anggaran negara dapat diarahkan kepada program yang mempunyai nilai politik tinggi tetapi manfaat jangka panjang rendah. Sebaliknya, program seperti pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, penelitian, dan penguatan data sering kurang menarik secara politis karena hasilnya tidak segera terlihat.

Solusinya mencakup transparansi anggaran, evaluasi independen, keterbukaan data, pengadaan kompetitif, audit, pencegahan konflik kepentingan, serta partisipasi publik.

8. Politik dan Ekonomi sebagai Titik Singgung Utama

Ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Setiap keputusan ekonomi memiliki konsekuensi distribusional: ada pihak yang memperoleh manfaat, menanggung biaya, atau kehilangan kesempatan.

Dalam model makroekonomi Keynesian:

$$\begin{aligned} &[\\ Y &= C + I + G + (X-M) \\ &] \end{aligned}$$

Pendapatan nasional ditentukan oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Naskah sumber menegaskan bahwa masing-masing komponen juga memiliki dimensi politik. Konsumsi terkait daya beli masyarakat; investasi terkait kepercayaan dunia usaha; pengeluaran pemerintah terkait pilihan politik anggaran; sedangkan ekspor-impor berkaitan dengan daya saing dan hubungan internasional.

Konsumsi

Konsumsi rumah tangga dipengaruhi pendapatan, harga, suku bunga, pekerjaan, serta ekspektasi. Penurunan konsumsi dapat menjadi sinyal melemahnya optimisme masyarakat.

Investasi

Investasi tidak hanya dipengaruhi insentif pajak. Investor memperhatikan kepastian hukum, stabilitas politik, konsistensi regulasi, kualitas infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, dan integritas birokrasi.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merefleksikan prioritas politik. Pilihan antara subsidi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial merupakan pilihan mengenai distribusi sumber daya.

Ekspor dan Impor

Kebijakan perdagangan melibatkan kepentingan produsen, konsumen, pekerja, importir, eksportir, serta mitra internasional. Proteksi dapat membantu industri tertentu, tetapi meningkatkan biaya bagi industri lain dan konsumen.

Karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi harus dibaca bersama kualitas pertumbuhan. Naskah mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 sebesar 5,61 persen, tetapi sekaligus menekankan pentingnya pemerataan, produktivitas, daya beli, dan kesejahteraan yang dirasakan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menghasilkan legitimasi apabila:

- lapangan kerja yang tercipta bersifat informal;
- pendapatan riil stagnan;
- biaya perumahan meningkat;
- kesenjangan wilayah melebar;
- harga pangan membebani rumah tangga;
- layanan publik tidak membaik;
- manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Dengan demikian, tantangan pemerintah adalah mengubah pertumbuhan statistik menjadi **perceived welfare**, yaitu kesejahteraan yang benar-benar dirasakan.

9. Kesejahteraan Objektif dan Kesejahteraan yang Dirasakan

Terdapat perbedaan antara indikator ekonomi objektif dan pengalaman subjektif masyarakat. Pemerintah dapat menyampaikan bahwa inflasi terkendali, pertumbuhan positif, investasi meningkat, atau kemiskinan menurun. Namun, masyarakat menilai keadaan melalui pengalaman sehari-hari.

Seorang kepala keluarga menilai ekonomi melalui harga beras, biaya sekolah, transportasi, cicilan rumah, listrik, pekerjaan anak, dan kemampuan menabung. Seorang lulusan universitas menilai ekonomi melalui peluang mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Pedagang kecil menilai ekonomi melalui jumlah pembeli dan margin keuntungan. Petani menilai ekonomi melalui harga pupuk, cuaca, akses pasar, dan harga hasil panen.

Kesenjangan antara data makro dan pengalaman mikro dapat menciptakan masalah komunikasi sekaligus legitimasi. Apabila pemerintah hanya mengulang angka agregat tanpa mengakui kesulitan yang dirasakan warga, masyarakat dapat merasa diabaikan.

Oleh karena itu, kebijakan ekonomi perlu menggunakan dua kelompok indikator:

Indikator makro

- pertumbuhan PDB;
- inflasi;
- nilai tukar;
- cadangan devisa;
- defisit fiskal;
- utang;
- investasi;
- ekspor;

- produktivitas.

Indikator kesejahteraan nyata

- pendapatan median;
- upah riil;
- kualitas pekerjaan;
- pengeluaran rumah tangga;
- biaya pangan;
- akses perumahan;
- waktu tempuh;
- kualitas pendidikan;
- akses kesehatan;
- mobilitas sosial;
- ketimpangan wilayah.

Pendekatan ini mencegah pemerintah terjebak dalam apa yang dapat disebut **the politics of aggregate numbers**, yaitu penggunaan indikator agregat untuk membangun citra keberhasilan tanpa cukup memperhatikan distribusi manfaat.

10. Bank Indonesia dan Persinggungan Fiskal–Moneter

Bank Indonesia berada pada posisi strategis. Ia harus menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung stabilitas sistem keuangan, sementara pemerintah membutuhkan pertumbuhan, lapangan kerja, investasi, serta ruang fiskal.

Hubungan fiskal–moneter adalah titik tangens yang sensitif. Kebijakan fiskal yang ekspansif dapat meningkatkan permintaan agregat, tetapi juga menimbulkan tekanan inflasi atau pembiayaan. Kebijakan moneter ketat dapat menjaga nilai tukar dan harga, tetapi meningkatkan biaya kredit dan memperlambat investasi.

Naskah sumber menyebut BI-Rate Juli 2026 pada tingkat 5,75 persen dan menegaskan bahwa keputusan suku bunga memengaruhi kredit, konsumsi, investasi, pasar modal, nilai tukar, serta persepsi masyarakat.

Independensi bank sentral penting karena kebijakan moneter membutuhkan kredibilitas jangka panjang. Pemerintah dapat memiliki insentif untuk mendorong suku bunga rendah menjelang momentum politik, meskipun tekanan inflasi meningkat. Bank sentral yang independen dapat menolak tekanan semacam itu.

Namun, independensi tidak berarti isolasi. Koordinasi tetap diperlukan, terutama dalam:

- pengendalian inflasi pangan;
- stabilisasi nilai tukar;

- pengelolaan arus modal;
- pembiayaan pembangunan;
- penanganan krisis;
- stabilitas sistem keuangan;
- komunikasi kebijakan.

Koordinasi yang sehat berarti tujuan dan informasi diselaraskan, tetapi keputusan teknis moneter tidak didikte oleh kepentingan politik jangka pendek.

11. Rupiah, Inflasi, dan Politik Kepercayaan

Nilai tukar bukan sekadar harga satu mata uang terhadap mata uang lain. Rupiah mengandung informasi tentang kepercayaan terhadap perekonomian, kebijakan fiskal, stabilitas politik, posisi eksternal, tingkat bunga, dan prospek pertumbuhan.

Investor mempertimbangkan:

- kredibilitas anggaran;
- independensi bank sentral;
- kepastian hukum;
- stabilitas pemerintahan;
- konsistensi regulasi;
- kondisi global;
- risiko geopolitik;
- kualitas institusi.

Karena itu, nilai tukar juga merupakan indikator politik. Pernyataan pemerintah yang tidak konsisten, konflik elite, perubahan aturan mendadak, atau ketidakpastian hukum dapat memengaruhi ekspektasi pasar.

Naskah sumber menyebut cadangan devisa akhir Juni 2026 sebesar US\$145,6 miliar sebagai bantalan eksternal, tetapi menegaskan bahwa cadangan devisa tidak dapat menggantikan reformasi struktural.

Hal yang sama berlaku pada inflasi. Inflasi mempunyai dampak politik karena penurunan daya beli segera dirasakan masyarakat. Inflasi pangan sangat sensitif karena proporsi pengeluaran pangan lebih besar pada kelompok berpendapatan rendah.

Secara sederhana:

$$\left[\begin{array}{l} \text{Pendapatan} \\ \text{Riil} = \frac{\text{Pendapatan} \backslash \text{Nominal}}{\text{Indeks} \backslash \text{Harga}} \end{array} \right]$$

Apabila pendapatan nominal naik 3 persen, tetapi biaya hidup naik 5 persen, masyarakat mengalami penurunan pendapatan riil. Statistik pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghapus pengalaman tersebut.

Karena itu, stabilitas harga adalah bagian dari stabilitas sosial dan politik.

12. Legitimasi: Lebih dari Sekadar Mandat Elektoral

Pemerintahan yang sah secara konstitusional belum tentu mempunyai legitimasi sosial yang stabil sepanjang masa jabatan. Pemilu memberikan mandat awal, tetapi legitimasi harus terus diperbarui melalui kinerja, keadilan, responsivitas, dan integritas.

Teori legitimasi membedakan sedikitnya dua bentuk utama:

12.1 Input Legitimacy

Legitimasi yang berasal dari proses politik: pemilu, partisipasi, keterwakilan, dan prosedur demokratis.

12.2 Output Legitimacy

Legitimasi yang berasal dari hasil pemerintahan: kesejahteraan, keamanan, pelayanan publik, stabilitas ekonomi, dan penyelesaian masalah.

Dapat ditambahkan bentuk ketiga:

12.3 Throughput Legitimacy

Legitimasi yang berasal dari kualitas proses pemerintahan, seperti transparansi, konsultasi, integritas, akuntabilitas, dan keadilan prosedural.

Naskah sumber mencatat penurunan tingkat persetujuan terhadap Presiden dalam survei yang dipublikasikan pada Juli 2026 dan menggunakannya sebagai sinyal perlunya perhatian terhadap *political confidence*.

Secara konseptual:

$$\begin{aligned} &[\\ L &= f(EP, W, IT, RL, PR, FP) \\ &] \end{aligned}$$

dengan:

- (EP) = kinerja ekonomi;
- (W) = kesejahteraan;
- (IT) = kepercayaan institusional;
- (RL) = supremasi hukum;
- (PR) = responsivitas politik;
- (FP) = keadilan prosedural.

Legitimasi tidak semata-mata ditentukan oleh popularitas. Pemerintah dapat mengambil kebijakan tidak populer tetapi penting bagi masa depan. Namun, legitimasi akan lebih terjaga apabila alasan kebijakan dijelaskan, beban dibagi secara adil, dan masyarakat melihat bahwa penguasa juga tunduk pada aturan.

13. Politik Jaringan dan Betweenness Centrality

Teori jaringan memandang politik sebagai hubungan antarnode. Node dapat berupa individu, lembaga, partai, organisasi, perusahaan, komunitas, atau negara.

Dalam jaringan, terdapat beberapa ukuran kekuasaan:

- **degree centrality**, yaitu banyaknya hubungan yang dimiliki aktor;
- **closeness centrality**, yaitu kedekatan aktor terhadap seluruh jaringan;
- **betweenness centrality**, yaitu kemampuan menjadi perantara antara kelompok-kelompok;
- **eigenvector centrality**, yaitu keterhubungan dengan aktor lain yang juga berpengaruh.

Naskah sumber menekankan konsep *betweenness centrality*: aktor yang mampu menghubungkan kelompok berbeda dapat memiliki kekuatan besar meskipun tidak selalu mempunyai posisi formal tertinggi.

Presiden mempunyai posisi sentral karena berhubungan dengan kabinet, partai, parlemen, birokrasi, pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, dan pemimpin internasional. Namun, efektivitas presiden tetap bergantung pada kemampuan mengelola jaringan tersebut.

Aktor penghubung sangat penting dalam masyarakat plural. Mereka dapat berupa:

- menteri koordinator;
- pemimpin partai;
- kepala daerah;
- tokoh masyarakat;
- akademisi;
- organisasi profesi;
- pemimpin agama;
- asosiasi pengusaha;
- media;
- diplomat.

Aktor penghubung dapat menciptakan konsensus, tetapi juga dapat menjadi broker kepentingan yang tidak transparan. Karena itu, kekuatan jaringan perlu diimbangi aturan konflik kepentingan, keterbukaan lobi, transparansi keputusan, dan akuntabilitas.

14. Principal–Agent Problem dalam Pemerintahan

Hubungan principal–agent terjadi ketika satu pihak memberikan mandat kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya. Dalam demokrasi, rakyat adalah principal dan pemerintah adalah agent. Namun, struktur sebenarnya lebih kompleks:

- rakyat memberikan mandat kepada presiden dan DPR;
- presiden memberikan mandat kepada menteri;
- menteri memberikan mandat kepada birokrasi;
- pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah;
- pemerintah memberikan kontrak kepada perusahaan;
- kementerian memberikan tugas kepada badan pelaksana.

Masalah muncul karena agent mempunyai informasi lebih banyak daripada principal. Agent juga dapat memiliki kepentingan sendiri. Akibatnya terjadi:

- *information asymmetry*;
- *shirking* atau penghindaran tanggung jawab;
- manipulasi laporan;
- penyimpangan anggaran;
- pelaksanaan yang berbeda dari tujuan kebijakan;
- saling melempar tanggung jawab.

Sebuah program nasional dapat dirancang dengan baik di pusat, tetapi hasilnya lemah karena data daerah buruk, kapasitas pelaksana terbatas, koordinasi rendah, atau insentif tidak selaras.

Pencegahan masalah principal–agent memerlukan:

- indikator kinerja yang jelas;
- data yang dapat diaudit;
- sistem pengawasan;
- transparansi kontrak;
- mekanisme keluhan;
- evaluasi independen;
- sanksi dan penghargaan;
- pelibatan penerima manfaat.

Dalam Politik Tangens, hubungan principal–agent menunjukkan bahwa titik singgung tidak berhenti pada perumusan kebijakan. Ia berlanjut dalam implementasi, pengawasan, evaluasi, dan umpan balik.

15. Game Theory dan Politik sebagai Permainan Berulang

Politik bukanlah permainan satu putaran. Pemerintah, partai, investor, birokrat, dan masyarakat berinteraksi berulang kali. Setiap keputusan memengaruhi reputasi dan ekspektasi pada masa berikutnya.

Pemerintah yang sering mengubah kebijakan secara mendadak akan kehilangan kredibilitas. Investor akan meminta premi risiko lebih tinggi. Birokrasi akan cenderung menunggu arahan. Masyarakat akan skeptis terhadap janji baru.

Sebaliknya, konsistensi menciptakan kepercayaan. Dalam permainan berulang, kerja sama dapat bertahan apabila aktor percaya bahwa hubungan akan berlanjut dan pelanggaran memiliki konsekuensi.

Naskah sumber menyatakan bahwa reputasi pemerintah merupakan aset strategis dan bahwa konsistensi aturan memperkuat posisi tawar pemerintah.

Sebagai contoh, pemerintah dapat berjanji tidak mengubah aturan investasi secara retroaktif. Apabila janji tersebut ditepati dalam beberapa kasus, investor lebih percaya. Apabila dilanggar, kerugian reputasi dapat lebih besar daripada keuntungan kebijakan jangka pendek.

Konsep *credible commitment* menjadi penting. Pemerintah harus mampu meyakinkan aktor lain bahwa kebijakan akan dijalankan secara konsisten, sekalipun terjadi perubahan pejabat atau tekanan politik.

Institusi membantu membentuk komitmen tersebut. Undang-undang, kontrak, pengadilan, lembaga independen, dan prosedur transparan mengurangi ketergantungan pada janji personal.

16. Media, Informasi, dan Politik Persepsi

Media bukan sekadar penyampai informasi. Media memilih isu, membingkai peristiwa, mengatur prioritas, dan membentuk persepsi publik. Dalam era digital, fungsi tersebut tidak hanya dijalankan media massa, tetapi juga platform, algoritma, influencer, komunitas daring, dan pengguna biasa.

Politik Tangens di ruang digital mempunyai beberapa karakteristik:

1. informasi bergerak sangat cepat;
2. emosi sering lebih mudah menyebar daripada analisis;
3. algoritma memperkuat konten yang menarik perhatian;
4. disinformasi dapat memengaruhi kepercayaan;
5. batas antara komunikasi publik dan propaganda semakin kabur;
6. pemerintah dapat berkomunikasi langsung dengan warga;
7. masyarakat dapat mengawasi pemerintah secara lebih cepat.

Komunikasi pemerintah yang buruk dapat memperbesar krisis. Kebijakan yang substantif mungkin ditolak karena penjelasannya terlambat atau tidak empatik. Sebaliknya, komunikasi yang baik tidak dapat selamanya menutupi kebijakan yang lemah.

Pemerintah perlu membedakan komunikasi publik dari pencitraan. Komunikasi publik harus:

- menjelaskan masalah;
- mengakui ketidakpastian;
- menyampaikan pilihan kebijakan;
- menguraikan manfaat dan biaya;
- menjawab kritik;
- menyediakan data;
- memperbaiki kesalahan.

Kepercayaan dibangun bukan dengan menghilangkan kritik, tetapi dengan menunjukkan bahwa kritik dapat didengar dan dijawab secara rasional.

17. Pusat dan Daerah sebagai Titik Tangens

Indonesia bukan hanya Jakarta dan Jawa. Legitimasi pembangunan ditentukan oleh kemampuan negara menjangkau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan wilayah kepulauan lainnya.

Hubungan pusat–daerah mencakup persinggungan dalam:

- pembagian kewenangan;
- transfer fiskal;
- pengelolaan sumber daya alam;
- pembangunan infrastruktur;
- pelayanan publik;
- investasi;
- perlindungan masyarakat adat;
- pemekaran wilayah;
- kebijakan lingkungan;
- penguatan kapasitas pemerintah daerah.

Naskah sumber secara khusus menekankan bahwa pembangunan luar Jawa merupakan bagian penting dari legitimasi ekonomi negara.

Desentralisasi dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, desentralisasi juga dapat memindahkan korupsi dan oligarki dari pusat ke daerah apabila pengawasan lemah.

Karena itu, keseimbangan pusat–daerah membutuhkan:

- pembagian tugas yang jelas;
- transfer fiskal berbasis kebutuhan dan kinerja;
- penguatan kapasitas administrasi;
- data terintegrasi;
- pengawasan demokratis;
- koordinasi lintas wilayah;
- ruang inovasi lokal;
- perlindungan kepentingan nasional.

Pembangunan daerah harus menghindari model ekstraktif yang mengambil sumber daya tanpa menciptakan nilai tambah lokal. Daerah penghasil sumber daya perlu memperoleh manfaat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, lingkungan yang terjaga, dan kesempatan ekonomi.

18. Keadilan Sosial sebagai Dasar Keseimbangan Politik

Stabilitas politik yang tidak ditopang keadilan bersifat rapuh. Ketimpangan tidak selalu segera menghasilkan konflik, tetapi dapat mengikis kepercayaan dan rasa memiliki terhadap negara.

Keadilan sosial bukan berarti semua orang memperoleh hasil yang sama. Keadilan mencakup:

- kesempatan yang layak;
- akses pelayanan dasar;
- perlindungan terhadap kelompok rentan;
- perlakuan setara di hadapan hukum;
- distribusi beban yang proporsional;
- mobilitas sosial;
- pengakuan terhadap kontribusi daerah;
- perlindungan generasi mendatang.

Dalam Politik Tangens, keadilan menentukan apakah persinggungan kepentingan menghasilkan kompromi yang dapat diterima atau dominasi kelompok kuat.

Kebijakan yang efisien secara ekonomi dapat ditolak apabila dipandang tidak adil. Misalnya, pengurangan subsidi mungkin masuk akal secara fiskal, tetapi dapat menimbulkan penolakan apabila masyarakat berpendapatan rendah menanggung beban terbesar sementara pemborosan elite tidak dikurangi.

Oleh sebab itu, reformasi harus memperhatikan urutan, kompensasi, komunikasi, dan distribusi biaya.

19. Indonesia dalam Persinggungan Geopolitik

Indonesia berada di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, jalur perdagangan global, kawasan ASEAN, serta kompetisi kekuatan besar. Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, Uni Eropa, negara-negara ASEAN, dan Global South mempunyai kepentingan terhadap Indonesia.

Naskah sumber menempatkan *strategic autonomy* sebagai pilihan penting: Indonesia tidak berkepentingan menjadi satelit kekuatan tertentu dan perlu mempertahankan ruang diplomasi yang luas.

Kemandirian strategis bukan berarti netral dalam semua persoalan atau menolak kerja sama. Artinya, Indonesia menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional, bukan tekanan blok tertentu.

Posisi geopolitik Indonesia ditopang oleh:

- jumlah penduduk;
- ukuran ekonomi;
- sumber daya alam;
- wilayah maritim;
- posisi di ASEAN;
- jalur pelayaran;
- pasar domestik;
- legitimasi sebagai negara demokratis besar;
- hubungan dengan Global South.

Namun, potensi geografis tidak otomatis menjadi kekuatan. Leverage geopolitik membutuhkan:

- ekonomi produktif;
- industri berteknologi;
- ketahanan pangan dan energi;
- pertahanan yang memadai;
- diplomasi profesional;
- stabilitas politik;
- kredibilitas institusi;
- penguasaan teknologi;
- kohesi nasional.

Indonesia juga dapat berperan sebagai **bridge state**, yaitu negara yang menjembatani kepentingan yang berbeda. Peran tersebut relevan dalam isu perdamaian, perdagangan, perubahan iklim, keamanan maritim, energi, ekonomi digital, dan reformasi tata kelola global.

Namun, peran sebagai jembatan tidak boleh berubah menjadi sikap tanpa prinsip. Indonesia tetap perlu menentukan batas berdasarkan kedaulatan, hukum internasional, kepentingan ekonomi, dan nilai kemanusiaan.

20. Tangent Equilibrium of Indonesia

Naskah sumber mengembangkan model **Tangent Equilibrium of Indonesia**:

$$\begin{aligned} &[\\ TEI &= f(P, D, E, I, S, G, R) \\ &] \end{aligned}$$

dengan kekuatan politik, akuntabilitas demokratis, kinerja ekonomi, kualitas institusi, legitimasi sosial, posisi geopolitik, dan kredibilitas regulasi sebagai komponen.

Model tersebut dapat dipahami sebagai keseimbangan dinamis, bukan keadaan tanpa konflik. Dalam demokrasi, konflik kepentingan adalah wajar. Keseimbangan tercapai apabila konflik dapat diselesaikan melalui institusi dan tidak menghancurkan sistem.

Secara lebih luas:

$$\begin{aligned} &[\\ TEI &= \alpha P + \beta D + \gamma E + \delta I + \epsilon S + \zeta G + \eta R - \theta C \\ &] \end{aligned}$$

dengan (C) sebagai risiko konsentrasi, korupsi, konflik, dan ketimpangan.

Model tersebut tidak harus dihitung secara matematis pada tahap awal. Ia dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi.

Sebuah pemerintahan dapat memiliki kekuatan politik tinggi, tetapi kualitas institusinya rendah. Negara dapat memiliki pertumbuhan tinggi, tetapi legitimasi sosial melemah. Demokrasi dapat kompetitif, tetapi kapasitas birokrasi rendah. Posisi geopolitik dapat strategis, tetapi daya saing ekonomi tidak memadai.

Keseimbangan membutuhkan kombinasi, bukan dominasi satu variabel.

21. Political Tangency Index

Konsep Politik Tangens dapat dikembangkan menjadi **Political Tangency Index** atau PTI. Indeks tersebut mengukur intensitas dan kualitas persinggungan kepentingan dalam suatu kebijakan.

PTI dapat dibagi menjadi dua dimensi:

21.1 Intensitas Tangensi

Mengukur banyaknya aktor dan besarnya kepentingan yang terlibat:

- jumlah kelompok pemangku kepentingan;
- nilai ekonomi kebijakan;
- tingkat perhatian publik;
- dampak terhadap anggaran;
- sensitivitas politik;
- keterlibatan pemerintah daerah;
- pengaruh internasional.

21.2 Kualitas Tangensi

Mengukur cara persinggungan dikelola:

- transparansi;
- partisipasi;
- keseimbangan kekuasaan;
- kepastian hukum;
- kualitas bukti;
- akuntabilitas;
- efektivitas penyelesaian konflik;
- pemerataan manfaat.

Secara sederhana:

$$\begin{aligned} &[\\ PTI &= TI \times TQ \\ &] \end{aligned}$$

di mana *TI* adalah *Tangency Intensity* dan *TQ* adalah *Tangency Quality*.

Suatu proyek strategis dapat mempunyai intensitas tangensi tinggi karena melibatkan pemerintah, investor, masyarakat, lingkungan, dan geopolitik. Apabila kualitas tata kelolanya tinggi, proyek menjadi sumber kolaborasi. Apabila kualitasnya rendah, proyek menjadi sumber konflik.

22. Tiga Skenario Indonesia

22.1 Skenario Pertama: Tangent Equilibrium

Dalam skenario ini, pemerintah mampu menjaga stabilitas sekaligus memperbaiki legitimasi. Pertumbuhan tetap relatif kuat, inflasi terkendali, investasi meningkat, koordinasi fiskal–moneter berjalan, serta institusi diperkuat.

Titik persinggungan berubah menjadi titik kolaborasi. Koalisi politik berorientasi kinerja. Pemerintah menerima pengawasan sebagai bagian dari legitimasi. Kebijakan sosial tepat sasaran. Daerah

memperoleh ruang pembangunan. Investor memperoleh kepastian hukum. Masyarakat melihat perbaikan nyata dalam kehidupan.

Skenario ini tidak berarti tidak ada konflik. Konflik tetap ada, tetapi dikelola melalui hukum, dialog, dan institusi.

22.2 Skenario Kedua: Elite Consolidation

Dalam skenario ini, koalisi politik kuat dan keputusan dapat diambil cepat. Pemerintah relatif stabil. Namun, kekuasaan terkonsentrasi, oposisi melemah, dan pengawasan menjadi kurang efektif.

Keuntungan jangka pendeknya adalah kecepatan kebijakan. Risikonya adalah persepsi oligarki, melemahnya kepercayaan, penyempitan ruang kritik, serta meningkatnya *regulatory capture*.

Stabilitas tetap dapat dipertahankan selama ekonomi tumbuh dan distribusi manfaat dianggap memadai. Akan tetapi, ketika terjadi tekanan ekonomi, legitimasi dapat turun cepat karena institusi koreksi sudah melemah.

22.3 Skenario Ketiga: Confidence Shock

Skenario ini muncul ketika beberapa tekanan terjadi bersamaan:

- pertumbuhan melemah;
- inflasi meningkat;
- rupiah tertekan;
- investasi turun;
- lapangan kerja memburuk;
- konflik elite meningkat;
- kepercayaan publik menurun.

Naskah sumber menyebut bahwa dalam keadaan ini titik persinggungan dapat berubah menjadi titik konflik, tetapi menegaskan bahwa skenario tersebut bukan kesimpulan deterministik. Kebijakan kredibel, koordinasi, perlindungan sosial, dan komunikasi publik dapat mencegah krisis sistemik.

23. Tangent Governance sebagai Model Tata Kelola

Untuk mengelola berbagai persinggungan kepentingan, diperlukan **Tangent Governance**. Model ini bukan sekadar forum konsultasi, melainkan sistem kelembagaan yang memungkinkan para aktor berinteraksi secara transparan dan bertanggung jawab.

Unsur Tangent Governance meliputi:

23.1 Pemetaan Pemangku Kepentingan

Sebelum kebijakan dibuat, pemerintah perlu memetakan:

- siapa yang memperoleh manfaat;
- siapa yang menanggung biaya;

- siapa yang mempunyai kewenangan;
- siapa yang memiliki informasi;
- siapa yang rentan;
- siapa yang dapat menghambat atau mempercepat implementasi.

23.2 Evidence-Based Policy

Kebijakan perlu didukung data, penelitian, evaluasi dampak, dan pembelajaran dari pengalaman.

23.3 Deliberasi

Para pihak perlu memperoleh ruang menyampaikan alasan, bukan sekadar posisi. Deliberasi membantu menemukan kepentingan yang tersembunyi di balik tuntutan.

23.4 Transparansi

Informasi dasar, pilihan kebijakan, biaya, kontrak, dan indikator keberhasilan perlu tersedia bagi publik.

23.5 Akuntabilitas

Harus jelas siapa bertanggung jawab terhadap keputusan dan hasil.

23.6 Mekanisme Koreksi

Kebijakan harus dapat diperbaiki apabila bukti menunjukkan kegagalan.

23.7 Perlindungan Kelompok Lemah

Partisipasi formal tidak cukup apabila kelompok kuat mendominasi. Negara harus memastikan kelompok rentan memiliki representasi.

23.8 Koordinasi Multilevel

Kebijakan nasional perlu melibatkan pusat, daerah, dan masyarakat lokal.

Naskah sumber mengusulkan agar pemerintah, DPR, pengusaha, akademisi, masyarakat sipil, pekerja, dan pemerintah daerah dipertemukan dalam perumusan kebijakan.

24. Rekomendasi Strategis

24.1 Menjaga Kredibilitas Institusi Ekonomi

Independensi Bank Indonesia perlu dijaga. Kebijakan fiskal harus transparan, terukur, dan berkelanjutan. Penggunaan anggaran perlu disertai indikator manfaat.

24.2 Mengubah Koalisi Kekuasaan Menjadi Koalisi Kinerja

Keberhasilan koalisi diukur melalui lapangan kerja, produktivitas, pengurangan kemiskinan, kualitas pelayanan, dan kepercayaan publik.

24.3 Memperkuat Checks and Balances

Pengawasan bukan hambatan pemerintahan, melainkan mekanisme pencegah kesalahan besar. Parlemen, pengadilan, lembaga audit, pers, akademisi, dan masyarakat sipil harus dapat menjalankan fungsi koreksi.

24.4 Menjadikan Biaya Hidup sebagai Prioritas

Inflasi pangan, energi, transportasi, perumahan, kesehatan, dan pendidikan berhubungan langsung dengan legitimasi.

24.5 Memperkuat Kepastian Hukum

Investor membutuhkan kepastian lebih daripada janji insentif. Regulasi perlu konsisten, sederhana, tidak retroaktif, dan dapat diprediksi.

24.6 Mencegah Regulatory Capture

Proses legislasi dan regulasi harus membuka informasi mengenai pihak-pihak yang berkonsultasi, potensi konflik kepentingan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

24.7 Membangun Sistem Data Terpadu

Kebijakan yang baik membutuhkan data sosial-ekonomi yang mutakhir, terintegrasi, dan dapat diverifikasi.

24.8 Memperkuat Pemerintah Daerah

Desentralisasi perlu disertai kapasitas, pengawasan, inovasi, serta pembagian sumber daya yang adil.

24.9 Mempertahankan Strategic Autonomy

Indonesia harus dapat bekerja sama dengan berbagai kekuatan tanpa kehilangan independensi kepentingan nasional.

24.10 Meningkatkan Literasi Kebijakan Publik

Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memungkinkan mereka menilai kebijakan secara substantif, bukan hanya melalui slogan atau polarisasi.

24.11 Mengembangkan Sistem Peringatan Dini Legitimasi

Pemerintah perlu memantau indikator:

- kepercayaan terhadap institusi;
- persepsi keadilan;
- biaya hidup;
- pengangguran;
- ketidakpuasan daerah;
- sentimen pasar;
- konflik sosial;
- kualitas pelayanan.

24.12 Menempatkan Keadilan Antargenerasi dalam Kebijakan

Utang, eksploitasi sumber daya, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim menimbulkan beban bagi generasi mendatang. Politik Tangens harus mencakup kepentingan warga yang belum memiliki suara elektoral.

25. Implikasi bagi Manajemen Publik

Konsep Politik Tangens relevan bagi manajemen karena pemerintahan modern adalah proses mengelola kepentingan, jaringan, sumber daya, risiko, dan legitimasi.

Pemimpin publik tidak cukup mengandalkan kewenangan formal. Mereka perlu mempunyai:

- kemampuan berpikir sistem;
- kecerdasan politik;
- kemampuan negosiasi;
- literasi ekonomi;
- pemahaman data;
- komunikasi publik;
- sensitivitas sosial;
- integritas;
- kemampuan membangun jaringan;
- orientasi jangka panjang.

Dalam organisasi publik, kebijakan sering gagal bukan karena tujuan salah, tetapi karena pemangku kepentingan tidak dipetakan, insentif tidak selaras, komunikasi buruk, dan kapasitas implementasi lemah.

Manajemen berbasis Politik Tangens mengharuskan pemimpin menanyakan:

1. Kepentingan siapa yang terlibat?
 2. Sumber daya apa yang dikuasai masing-masing aktor?
 3. Di mana titik temu dapat dibangun?
 4. Di mana potensi konflik?
 5. Institusi apa yang dapat mengelola konflik?
 6. Siapa yang menanggung risiko?
 7. Bagaimana legitimasi dipertahankan?
 8. Apa dampak jangka panjangnya?
-

26. Kritik dan Pengembangan Konseptual

Konsep *Politics of Tangents* mempunyai kekuatan karena mampu menggambarkan politik yang cair, berlapis, dan tidak linear. Namun, beberapa pengembangan diperlukan.

Pertama, istilah tangens secara geometris menggambarkan satu titik sentuhan tanpa perpotongan. Dalam politik, hubungan antarkepentingan sering berlangsung lama dan berulang. Karena itu, metafora dapat diperluas menjadi **zones of tangency**, yaitu zona persinggungan.

Kedua, konsep perlu membedakan tangensi yang setara dan tidak setara. Persinggungan antara pemerintah dan perusahaan besar berbeda dari persinggungan pemerintah dan komunitas kecil. Ketidakeimbangan sumber daya dapat membuat kompromi tampak sukarela tetapi sebenarnya koersif.

Ketiga, konsep perlu memasukkan teknologi digital. Algoritma dan platform kini menjadi aktor yang membentuk informasi, mobilisasi, serta persepsi.

Keempat, *Politics of Tangents* perlu dikembangkan menjadi model empiris. Variabel, indikator, sumber data, dan metode pengukuran perlu dirumuskan secara operasional.

Kelima, perlu dibedakan antara **productive tangency** dan **predatory tangency**. Productive tangency menghasilkan nilai publik. Predatory tangency menghasilkan kolusi, rente, atau dominasi.

Keenam, diperlukan dimensi waktu. Persinggungan yang menguntungkan dalam jangka pendek dapat merugikan dalam jangka panjang.

27. Kesimpulan

Indonesia pada 2025–2026 dapat dipahami sebagai negara yang berada pada persinggungan kekuasaan, ekonomi, demokrasi, institusi, masyarakat, teknologi, dan geopolitik. Fondasi negara dan ekonomi mungkin relatif kuat, tetapi kekuatan tersebut tidak otomatis menghasilkan keseimbangan politik.

Pertanyaan utama bukan hanya apakah pemerintah mempunyai dukungan yang besar, melainkan apakah dukungan tersebut menghasilkan kinerja. Bukan hanya apakah ekonomi tumbuh, melainkan apakah pertumbuhan menciptakan kesejahteraan nyata. Bukan hanya apakah negara stabil, melainkan apakah stabilitas disertai keadilan dan legitimasi. Bukan hanya apakah Indonesia mempunyai posisi strategis, melainkan apakah posisi tersebut digunakan untuk kepentingan nasional.

Naskah sumber merumuskan formula:

[
 \text{Keberadaan Indonesia yang kuat} =
 \text{Stabilitas Politik} +
 \text{Akuntabilitas Demokratis} +
 \text{Pertumbuhan Ekonomi} +
 \text{Kualitas Institusi} +
 \text{Keadilan Sosial} +
 \text{Kemandirian Strategis}
]

Formula tersebut mengandung pesan bahwa tidak satu pun unsur dapat berdiri sendiri. Stabilitas tanpa akuntabilitas dapat berubah menjadi otoritarianisme. Pertumbuhan tanpa keadilan dapat menghasilkan ketegangan. Demokrasi tanpa institusi dapat menghasilkan kebuntuan. Kemandirian strategis tanpa ekonomi produktif hanya menjadi retorika.

Indonesia yang kuat bukan Indonesia yang bebas dari konflik kepentingan. Konflik adalah bagian alamiah dari masyarakat demokratis. Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang mampu mengubah konflik menjadi kompromi kebijakan, kompetisi menjadi produktivitas, keragaman menjadi kekuatan, dan persinggungan menjadi titik temu nasional.

Political stability hanya menunjukkan bahwa negara mampu mempertahankan keteraturan. **Political equilibrium** menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi: kekuasaan, demokrasi, ekonomi, institusi, masyarakat, dan kepentingan nasional berada dalam keseimbangan yang memungkinkan pembangunan berlangsung tanpa mengorbankan kebebasan, keadilan, serta martabat manusia.

Pada akhirnya, keberhasilan Politik Tangens tergantung pada kemampuan negara mengelola hubungan. Kekuasaan tidak cukup hanya dimiliki; ia harus diarahkan. Pertumbuhan tidak cukup hanya dicatat; ia harus dirasakan. Stabilitas tidak cukup hanya dipertahankan; ia harus memperoleh legitimasi. Diplomasi tidak cukup hanya aktif; ia harus menghasilkan manfaat nasional.

Ketika berbagai kepentingan dapat dipertemukan secara adil, transparan, dan produktif, *Politics of Tangents* tidak lagi menjadi politik transaksi atau konflik. Ia dapat menjadi arsitektur besar bagi titik temu nasional—suatu cara mengelola Indonesia sebagai negara demokratis, majemuk, berdaulat, adil, dan bermartabat.

Glossarium

Akuntabilitas demokratis

Kewajiban pemegang kekuasaan untuk menjelaskan keputusan, menerima pengawasan, dan menanggung konsekuensi politik maupun hukum.

Betweenness centrality

Ukuran dalam teori jaringan yang menunjukkan sejauh mana seorang aktor menjadi perantara antara kelompok-kelompok lain.

Bridge state

Negara yang mampu menjembatani kepentingan, kawasan, atau kelompok geopolitik yang berbeda.

Checks and balances

Mekanisme pembagian dan pengawasan kekuasaan agar tidak terkonsentrasi pada satu lembaga.

Confidence shock

Guncangan kepercayaan yang terjadi ketika tekanan ekonomi, politik, dan institusional muncul secara bersamaan.

Elite consolidation

Keadaan ketika kekuasaan politik semakin terpusat pada koalisi atau kelompok elite tertentu.

Input legitimacy

Legitimasi yang berasal dari pemilu, keterwakilan, dan partisipasi politik.

Institutional trust

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara dan kemampuan lembaga tersebut menjalankan tugasnya.

Moral hazard

Perilaku mengambil risiko berlebihan karena kerugian diperkirakan akan ditanggung oleh pihak lain.

Output legitimacy

Legitimasi yang berasal dari hasil atau kinerja pemerintahan.

Perceived welfare

Kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Political equilibrium

Keseimbangan antara kekuasaan, ekonomi, demokrasi, institusi, legitimasi, dan kepentingan nasional.

Political network state

Negara yang proses kekuasaannya berlangsung melalui jaringan hubungan formal maupun informal.

Politics of Tangents

Kerangka yang memandang politik sebagai persinggungan berbagai kekuasaan dan kepentingan pada isu tertentu.

Principal-agent problem

Masalah yang muncul ketika pelaksana mandat mempunyai informasi dan kepentingan berbeda dari pemberi mandat.

Public choice

Pendekatan yang menganalisis perilaku politisi dan birokrat sebagai aktor yang juga mempunyai kepentingan dan insentif pribadi.

Regulatory capture

Keadaan ketika regulator lebih banyak melayani kepentingan industri yang diawasi daripada kepentingan publik.

Rent seeking

Upaya memperoleh keuntungan melalui akses terhadap kekuasaan, lisensi, proteksi, atau regulasi, bukan melalui produktivitas.

Strategic autonomy

Kemampuan negara menentukan kebijakan luar negerinya secara mandiri berdasarkan kepentingan nasional.

Tangent equilibrium

Keadaan ketika persinggungan berbagai kepentingan dikelola menjadi keseimbangan dan kolaborasi.

Tangent Governance

Tata kelola yang mempertemukan pemerintah, parlemen, pasar, masyarakat, akademisi, pekerja, dan daerah dalam proses kebijakan yang terbuka dan akuntabel.

Throughput legitimacy

Legitimasi yang berasal dari kualitas proses pemerintahan, termasuk transparansi, keadilan, dan integritas.

Dokumen sumber: [POLITICS OF TANGENTS.pdf](#)